

## BAB III

### KERUSUHAN MEI 1998 DI SURAKARTA

#### A. Latar Belakang Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia

Krisis ekonomi yang terjadi pada penghujung abad ke-20 (1997-1998) memberikan dampak kerugian yang sangat besar. Rupiah yang turun drastis, membengkaknya hutang luar negeri, dan munculnya krisis kepercayaan masyarakat kala itu yang menilai kebijakan pemerintah dalam menangani krisis keuangan belum maksimal. Pada Bulan Mei minggu kedua Tahun 1997, mata uang Thailand Baht mulai menjadi sasaran dari para spekulan.<sup>1</sup> Tepatnya pada tanggal 2 Juli 1997 adanya tekanan kuat dari para spekulan mata uang asing memaksa Bank Sentral Thailand untuk mengambangkan nilai tukar Baht. Krisis di beberapa negara Asia Tenggara berlanjut dengan turunnya nilai mata uang Filipina (Peso), Malaysia (Ringgit), hingga Indonesia (Rupiah) yang berlanjut menjadi krisis ekonomi.<sup>2</sup>

Jatuhnya nilai rupiah membuat pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar yang diikuti spot pasar, tetapi keadaan tersebut tetap membuat rupiah tidak stabil.

Pada akhirnya pemerintah melepaskan kurs rupiah pada tanggal 14 Agustus 1997. Dengan membiarkannya berfluktuasi secara bebas

---

<sup>1</sup> Spekulan dalam KKBI ialah orang yang mencari keuntungan besar. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*, hlm. 1524.

<sup>2</sup> Lilik Salamah. 2001. "Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia". *Journal Unair*, Vol. 14 No. 2 2001. Surabaya: Universitas Airlangga. Hlm. 65-66.

menggantikan sistem *managed floating* yang dianut pemerintah sejak devaluasi Oktober 1978.<sup>3</sup> Dengan demikian Bank Indonesia tidak melakukan Intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar rupiah, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar semata.<sup>4</sup> Ketatnya likuiditas di pasar uang serta menghindari kemungkinan terjadinya situasi perekonomian yang semakin memburuk, membuat lembaga Bank Indonesia untuk menurunkan diskonto SBI intervensi. Penurunan dilakukan secara bertahap sejak 4 September hingga 20 Oktober 1997. Sebagai langkah untuk merendam guncangan nilai tukar dilakukan beberapa upaya, salah satunya dengan meningkatkan pasokan devisa serta memantau kebutuhan devisa pihak swasta. Disisi lain kebijakan fiskal dilakukan dengan meningkatkan disiplin anggaran yang meliputi : peningkatan penerimaan dari sumber non migas yang diusahakan melalui peningkatan pajak barang mewah serta penerimaan bukan pajak, administrasi dan struktur perpajakan, pengurangan subsidi hingga privatisasi BUMN. Dipakainya sistem devisa yang terlalu bebas tanpa adanya sebuah pengawasan yang memadai, memungkinkan adanya arus modal dan valas yang dapat mengalir keluar-masuk secara bebas berapapun jumlahnya. Dikarenakan Indonesia menganut rezim devisa bebas dengan rupiah yang konvertibel, sehingga membuka peluang yang besar teruntuk orang yang bermain di pasar valuta asing.

---

<sup>3</sup>*Managed Floating* merupakan sistem nilai tukar fleksibel dimana pemerintah masih melakukan intervensi, terutama untuk memoderasi pergerakan ketika ada perubahan besar nilai tukar. Nilai tukar mengambang terkendali (2020, 9 Februari). *Cerdas.co* diakses melalui <https://cerdasco.com/nilai-tukar-mengambang-terkendali/> (diakses pada 1 Agustus 2021, Pukul 21.41).

<sup>4</sup> Lepi T.Tarmidi. 1999. "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran". *BMEB*, Vol. 1 No. 4 1999. Jakarta: Bank Indonesia Institute. Hlm. 3.

Masyarakat bebas membuka rekening valuta asing di dalam negeri maupun luar negeri. Valuta asing bebas diperdagangkan di dalam negeri. Sementara rupiah bebas diperdagangkan di pusat-pusat keuangan di luar negeri.<sup>5</sup>

Tabel 3.1. Dinamika Nilai Rupiah November 1997 - Juli 1998.

Dinamika Nilai Rupiah November 1997 – Juli 1998	
Bulan	Nilai Rupiah
November 1997	Rp. 4.000/Dollar
Desember 1997	Rp. 7.750/Dollar
Januari 1998	Rp. 10.000/Dollar
Februari 1998	Rp. 9.100 – 9.800/Dollar
Maret 1998	Rp. 11.000 – 8.600/Dollar
April 1998	Rp. 7.575 – 8.600/Dollar
Mei 1998	Rp. 7.960 – 8.100/Dollar
Juni 1998	Rp. 11.600 – 15.000/Dollar
Juli 1998	Rp. 14.800 – 13.225/Dollar

Sumber: Lilik Salamah, *Op. Cit.*, hlm. 67-68.

Pada Bulan September 1997, menghadapi penurunan nilai tukar rupiah yang semakin menjadi. Pemerintah menunda proyek-proyek besar baik dari segi infrastruktur maupun aspek bidang lainnya. Namun langkah ini belum juga

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

menyehatkan moneter Indonesia. Faktanya nilai tukar rupiah terus menurun.<sup>6</sup> Tercatat (tertera pada *Tabel 3.1*), pada Bulan November 1997, nilai rupiah jatuh menjadi Rp. 4.000 per dollar, di Bulan Desember 1997 jatuh menjadi Rp. 7.750 per dollar, Januari 1998 rupiah anjlok menjadi Rp. 10.000 per dollar, Februari 1998 rupiah menjadi antara Rp. 9.100 hingga Rp.9.800, pada Bulan Maret 1998 rupiah dikisaran Rp. 11.000 hingga Rp. 8.600, Bulan April 1998 rupiah menjadi antara Rp.7.575 hingga Rp. 8.600, pada Bulan Mei 1998 rupiah di antara Rp. 7.960 hingga Rp. 8.100, di Bulan Juni 1998 rupiah di antara Rp.11.600 hingga Rp. 15.000, pada Bulan Juli 1998 rupiah di antara Rp. 14.800 dan Rp. 13.225, dan hingga selanjutnya nilai rupiah naik turun terus.<sup>7</sup>

Rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia waktu itu dikarenakan sentralisasi kekuasaan beserta turunannya, seperti penguasaan ekonomi oleh kalangan elit penguasa, industrialisasi pencari rente, korupsi, kolusi, dan sebagainya. Hal ini menjadikan kondisi perekonomian Indonesia di ambang kekritisannya. Untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia yang semakin parah,

---

<sup>6</sup> Dikarenakan banyaknya pengembangan pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk terus menjadi penggerak utama pembangunan nasional, menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah pengurangan regulasi negara di berbagai sektor pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada peran serta swasta dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Melalui peningkatan minat investasi di berbagai sektor pembangunan yang diizinkan. Dengan semakin besarnya minat investasi swasta, tetapi tanpa didukung oleh sumber dana investasi dalam negeri yang memadai, mendorong pihak swasta melakukan pinjaman ke luar negeri, baik dalam bentuk pinjaman komersial maupun investasi portofolio, dengan ketentuan umum persyaratan pinjaman yang bersifat komersial, baik suku bunga maupun jangka waktu pembayaran kembali. Adwin Surya Atmadja. 2000. "Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia:Perkembangan dan Dampaknya". *Jurnal Akutansi dan Keuangan*. Vol. 2 No. 1 tahun 2000. Surabaya: Universitas Kristen Petra. Hlm. 88.

<sup>7</sup> Lilik Salamah, *Op. Cit.*, hlm. 67-68.

Indonesia bekerja sama dengan IMF (*International Monetary Fund*).<sup>8</sup> IMF memiliki dua pola dasar kebijakan yang selalu menjadi prasyarat diberikannya bantuan. Paket kebijakan yang pertama adalah *structural adjustment policy*. Dimana paket ini direkomendasikan untuk mengatasi masalah darurat neraca pembayaran. Paket kebijakan yang kedua adalah paket restrukturisasi perekonomian yang beraliran neoliberal. Paket ini berisi kebijakan deregulasi yang mengintrodukir perekonomian pasar yang seluas-luasnya.

Program asistensi IMF ditandatangani pada 31 Oktober 1997, dalam bentuk LoI (*Letter of Intent*) atau naskah kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi dengan mengakomodasikan persyaratan IMF, yang termuat dalam MEFP (*Memorandum of Financial Policies*). Setelah melewati beberapa tahapan persyaratan perundingan pemerintah Indonesia dengan IMF menemui kesepakatan, Soeharto menandatangani perundingan tersebut dengan kesepakatan final yang dituangkan dalam LoI pada tanggal 15 Januari 1998.

---

<sup>8</sup>IMF dibentuk pada Juli 1944 di Konferensi Bretton Woods, Amerika Serikat. Tujuan dibentuknya IMF adalah untuk memastikan stabilitas sistem moneter internasional, sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara beserta warganya untuk bertransaksi satu sama lain. Dalam rangka menjaga stabilitas dan mencegah krisis dalam sistem moneter internasional, IMF memantau kebijakan anggota negara yang bergabung serta perkembangan ekonomi dan keuangan nasional. Dengan memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami permasalahan dalam neraca pembayaran atau aspek perekonomian tertentu. Serta memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk membantu negara membangun lembaga ekonomi yang lebih baik. Fast Facts About the IMF. diakses melalui <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance> (diakses pada 20 Juli 2021, Pukul 20.07).

Meskipun kesepakatan dengan IMF terus berjalan sebagai upaya pemulihan krisis ekonomi, faktanya perekonomian Indonesia semakin buruk.

Secara perlahan Soeharto mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat sehingga memicu terjadinya protes sosial yang meluas, atas dasar lain rakyat menginginkan perubahan kepemimpinan. Berbagai penyimpangan pada pemerintahan Soeharto membawa rakyat kepada sikap anti pemerintah. Selain krisis ekonomi, krisis sosial dan budaya, krisis keamanan, hingga krisis politik membawa masyarakat menginginkan adanya rezim baru atau sebuah reformasi. Bagi masyarakat, pemerintahan Soeharto mengabaikan demokrasi dan kebebasan dalam berpendapat, pers dicekal apabila mengkritik kebijakan pemerintah, pembelaan HAM yang tidak ada. pemerintah membatasi ruang gerak yang sangat terbatas kepada masyarakat, mengingat pemerintah masa orde yang sistemnya bersifat sentralistis. Dimana peranan pemerintah pusat sangat menentukan jalannya bidang kehidupan masyarakat. Ditambah dengan maraknya praktik KKN dalam tubuh birokrasi, lembaga negara hingga perusahaan negara yang dilakukan oleh kroni dan keluarga Soeharto menambah tingkat kesenjangan sosial yang meningkat dalam masyarakat. Kesenjangan terjadi karena fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pengusaha rakyat biasa tidak sebanding dengan fasilitas yang didapat kroni dan keluarga Soeharto.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lilik Eka Aprilia. 2014. "Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998". *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Jember: Universitas Jember. Hlm. 2-6.

Pada tanggal 10 Maret 1998, Soeharto resmi ditetapkan sebagai presiden RI periode 1998-2003.<sup>10</sup> Hal ini tertuang dalam putusan rapat paripurna ke-10 tanggal 10 Maret 1998, dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahap II. Sehari setelahnya pada tanggal 11 Maret 1998 Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden kali ketujuh. Hal ini tidak terlepas dari dukungan para kerpercayaan Soeharto yang memintanya untuk mencalonkan diri kembali. Dilantiknya Soeharto menjadi presiden kembali, justru memicu aksi protes mahasiswa di seluruh Indonesia. Gerakan mahasiswa untuk melawan kekangan rezim orde baru, mulai menonjol sejak akhir Februari 1998. Beberapa tuntutan mahasiswa yang diinginkan saat itu ialah *pertama*, penurunan harga sembako, sebab harga kebutuhan pokok melonjak tajam sejak Juli 1997. *Kedua*, mahasiswa menuntut agar MPR tidak mempertahankan Soeharto sebagai presiden yang ketujuh kali. *Ketiga*, mahasiswa menuntut adanya reformasi politik dan ekonomi sejak MPR mengangkat Soeharto sebagai presiden kembali.<sup>11</sup>

Bagi mahasiswa satu-satunya jalan untuk terlepas dari belenggu krisis saat itu adalah dengan melakukan reformasi hukum, politik dan ekonomi yang dijalankan dengan konsisten dan segera. Demonstrasi mahasiswa terhadap sikap represif aparat keamanan, di lain pihak ada upaya dari pemerintah untuk meredam aksi-aksi mahasiswa tersebut. Salah satu diantaranya adalah tawaran berdialog ABRI (sekarang TNI) yang berinisiatif untuk berdialog dengan

---

<sup>10</sup>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Forrester, G. 2002. *The Fall of Soeharto*. Australia: C.Hurst & Co Ltd ISBN. Hlm.174.

mahasiswa. Pemerintah dalam berbagai kesempatan mengajak berdialog mahasiswa. Lewat pertemuan di Jakarta 24 Maret 1998 dan Bandung 30 Maret 1998, mahasiswa merumuskan bahwa berdialog dengan TNI dirasa kurang pas, mahasiswa hanya ingin berdialog dengan presiden.<sup>12</sup>

Beberapa dialog yang dilakukan pemerintah dengan mahasiswa tidak menemui titik temu. Seperti dialog Jenderal TNI Wiranto (selaku Menhakam/Pangab) pada tanggal 11 April 1998 dengan 32 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). Dilanjutkan dialog pemerintah, tokoh masyarakat dan mahasiswa pada tanggal 18 April 1998, serta dialog mahasiswa dengan Raden Hartono (selaku mendagri) pada tanggal 21 April 1998. Sesuai rangkaian dialog, rata-rata mahasiswa menyuarakan bahwa hasil dialog belum sesuai seperti yang diharapkan. Namun terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa bukan saatnya berdialog melainkan untuk melaksanakan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat, bahkan aksi reformasi mahasiswa ini akan terus dilakukan hingga pemerintah memenuhi tuntutan yang diinginkan.<sup>13</sup>

Pada saat maraknya aksi mahasiswa inilah, sekitar akhir Januari hingga April 1998, sejumlah aktivis mahasiswa dan orang-orang yang dianggap bersikap kritis terhadap pemerintah tiba-tiba hilang. Beberapa aktivis mahasiswa hilang satu persatu, sebagian dari mereka kembali, sebagian yang

---

<sup>12</sup> Sholahuddin, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>13</sup> *Ibid.*.

lain tidak ditemukan atau hilang. Ada dugaan kuat keterlibatan aparat keamanan dalam upaya menghilangkan orang-orang kritis tersebut.

Sejak awal Mei 1998, aksi mahasiswa dan massa rakyat semakin menjadi. Kasus kekerasan dan kerusuhan terjadi di berbagai wilayah kota di Indonesia. Pada tanggal 4 Mei 1998, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik juga dinaikkan dikarenakan pemerintah tidak dapat lagi menanggung biaya subsidi. Imbasnya tarif angkutan umum ikut naik.<sup>14</sup> Sebagai reaksi atas pengumuman pemerintah tersebut menimbulkan demo besar di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Serangkaian demo di beberapa kota terjadi secara kolektif. Seperti di Makassar, Medan, Yogyakarta, Surakarta, Bandung hingga Jakarta.<sup>15</sup>

Aksi mahasiswa yang terjadi sejak Februari 1998, memuncak pada tanggal 12 Mei 1998 di Kampus Universitas Trisakti. Peristiwa ini disebut sebagai Tragedi Trisakti. Terjadi peristiwa penembakan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa saat sedang melakukan unjuk rasa menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Dalam Tragedi Trisakti Menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, di antaranya Elang Mulya Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977-1998), Hafidin Royan (1976-1998), dan Hendriawan Sie

---

<sup>14</sup>Kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik, tertuang dalam Kepres No. 69 Tahun 1998 Tentang *harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri*. dan Kepres No. 79 Tahun 1998 Tentang *perubahan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara*.

<sup>15</sup> Sholahuddin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

(1975-1998).<sup>16</sup> Tragedi ini memicu kemarahan mahasiswa beserta masyarakat. Unjuk rasa dan aksi menuntut reformasi mengalami eskalasi yang luar biasa. Kerusuhan massal terjadi di beberapa kota Indonesia, puncaknya terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998 di Jakarta, Palembang, Medan, Surabaya, Lampung, Yogyakarta hingga Surakarta. Kerusuhan yang terjadi berbentuk penjarahan, pembakaran kendaraan bermotor hingga fasilitas umum serta aktivitas kriminal lainnya.<sup>17</sup>

Kerusuhan Mei 1998 dijadikan kesempatan untuk menuntaskan sentimen terhadap etnis Tionghoa. Mengingat prasangka buruk pandangan masyarakat non-Tionghoa (Pribumi) yang sudah mengakar kuat sejak masa kolonialisme, hal ini didasari pada anggapan bahwa masyarakat Tionghoa bekerja sama dengan penjajah. Berlanjut hingga beberapa periodisasi, aksi rasialisme terhadap masyarakat Tionghoa semakin kuat. Seperti kerusuhan yang terjadi di Surakarta Tahun 1912, Kudus Tahun 1918, Palembang 1947, serta beberapa daerah tertentu. Bahkan pada Tahun 1965, dimana tragedi G30S terjadi. Masyarakat Tionghoa dijadikan sasaran pembantaian massal dikarenakan adanya dugaan kuat bahwa Republik Rakyat Cina dianggap sebagai sponsor dari G30S. Imbasnya masyarakat etnis Tionghoa banyak yang dibunuh dengan tuduhan bekerjasama dengan komunis. Keadaan ini membawa sikap diskriminasi yang terus menerus terjadi di masa orde baru.

---

<sup>16</sup>Museum Pahlawan Reformasi 12 Mei 1998. [Humas.trisakti.ac.id](https://humas.trisakti.ac.id) diakses melalui <https://humas.triksakti.ac.id/museum-tragedi-12-mei-1998/sejarah>. (diakses pada 15 Juli 2021, Pukul 19.47).

<sup>17</sup> Sholahuddin, *Op. Cit.*, hlm. 43-44.

Puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998, demonstrasi massa sebagai upaya penuntutan lengsernya Soeharto dan keinginan rezim reformasi, justru melenceng keranah kerusuhan yang menysar kaum-kaum elite ekonomi. Masyarakat menganggap bahwa biang dari terjadinya krisis di Indonesia ialah mereka para penguasa perekonomian yang justru semakin kaya. Hal ini terutama berlaku bagi masyarakat etnis Tionghoa. Sistem dan tata pengolaahan ekonomi yang baik dari masyarakat Tionghoa menyebabkan mereka menjadi incaran para massa. beberapa dari masyarakat menghancurkan toko, perusahaan, gudang-gudang besar logistik milik pengusaha keturunan Tionghoa serta bank-bank swasta yang notabene pemegang sahamnya juga keturunan etnis Tionghoa.<sup>18</sup> Faktor anti Tionghoa telah menyebabkan beberapa rumah masyarakat Tionghoa turut menjadi sasaran penjarahan hingga pengrusakan. Kasus tindak pelecehan seksual bahkan pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa tidak luput dalam aksi kerusuhan massa pada saat itu. sasaran massa terhadap masyarakat etnis Tionghoa tidak hanya terjadi di Jakarta. Beberapa kota seperti Jember, Situbondo, Yogyakarta, Palembang, hingga Surakarta turut terkena dampak kerusuhan.

Tekanan dan kesenjangan sosial ekonomi yang diperparah oleh kelangkaan bahan pokok yang dialami masyarakat, rawan terhadap pengeksploitasian sehingga melahirkan dorongan-dorongan destruktif untuk melakukan tindak-tindak kekerasan. sebagian besar massa yang terlibat dalam kerusuhan pada dasarnya adalah korban dari keadaan serta struktur yang tidak

---

<sup>18</sup> Daud Ade Nurcahyo, *Op. Cit.*, hlm. 61.

adil. mereka kebanyakan dari lapisan rakyat. Lapisan rakyat paling bawah yang tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa dengan mudah memanfaatkan situasi kekacauan untuk mendapatkan kebutuhan yang paling dasar dengan melakukan penjarahan dan perampokan.<sup>19</sup>

## B. Kronik Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta

Pada tanggal 14 Mei 1998, ribuan mahasiswa UMS menggelar demo keprihatinan atas tewasnya Mozes Gatutkaca dan Tragedi Trisakti.<sup>20</sup> Sekitar pukul 09.30 WIB, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surakarta mulai berkumpul di kampus Pabelan (UNS). Sekitar pukul 10.00 WIB, para mahasiswa mulai maju ke depan kampus dan merangsek menuju Jalan Raya Solo-Kartasura. Aparat kepolisian menghadang dan meminta agar para demonstran mengurungkan niat berunjuk rasa di jalan. Hadangan aparat tidak mampu membendung gerak massa. Demonstran pun berhasil maju hingga ke pinggiran Jalan Raya Solo-Kartasura. Para aksi demonstran berhenti di pinggir jalan, dikarenakan aparat telah membangun barikade dengan kawat berduri tepat di pengujung jalan menuju kampus UMS.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Basuki Agus Sapurno, *op. cit.* Hlm. 87.

<sup>20</sup> Mozes Gatutkaca tewas pada tanggal 8 Mei 1998, dikarenakan akibat kebrutalan aparat keamanan. Dimana aksi bentrokan Gejayan semakin menjadi. Aksi Gejayan merupakan monumen perlawanan mahasiswa se-Yogyakarta menuntut atas ketidakpuasan pemerintahan Soeharto dan menginginkan Soeharto lengser. Aksi yang dimulai dengan *Long March* berujung menjadi anarkis. Angga Apip Wahyu. S. 2012. "Peranan Mahasiswa Yogyakarta Dalam Perjuangan Reformasi di Indonesia (1998)". *Skripsi*. Tidak atau belum diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm. 61-62.

<sup>21</sup> Sholahuddin, *Op. Cit.*, hlm. 44-45.

Memasuki pukul 11.00 WIB, para demonstran melakukan shalat ghaib untuk mendoakan mahasiswa yang gugur pada tragedi Trisakti. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan orasi-orasi para demonstran. Situasi dan kondisi semakin lama menjadi sangat emosional dan menegangkan pada kedua belah pihak. Aksi dorong mendorong tidak dapat dihindari. Sebelumnya terjadi negosiasi antara sejumlah perwakilan mahasiswa dengan aparat keamanan, meminta agar barikade disingkirkan sehingga membuat para demonstran bisa masuk ke jalan Raya Solo-Kartasura. Namun negosiasi tersebut gagal. Setelah negosiasi tidak memenuhi perizinan, wakil mahasiswa kembali ke barisan. Selang beberapa menit terjadi situasi yang *crowded*. Barisan demonstran mendorong barikade hingga jatuh dan mendesak barisan aparat keamanan untuk membentuk pagar betis.<sup>22</sup>

Adanya provokator yang melempar benda ke aparat keamanan menyebabkan aparat bergerak hingga melepaskan tembakan gas air mata. Suasana pun menjadi kacau. Aksi saling membalas antara mahasiswa dan aparat semakin menjadi. Aparat terus melakukan serangan untuk menghalau aksi mahasiswa keluar dari lingkup wilayah kampus. Massa yang tidak memiliki alat pertahanan untuk melawan aparat akhirnya berlarian hingga area kampus. Sedangkan massa yang memiliki alat pertahanan membalas lontaran gas air mata aparat dengan batu. Frekuensi pelemparan terus meningkat hingga menciptakan hujan batu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>23</sup> Lydiana Salim, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Memasuki siang hari, kericuhan antara demonstran dengan aparat masih tetap tidak surut. Massa yang berhasil lolos dari kartasura terus bergerak menuju kota dan melakukan perusakan. Sejumlah massa mulai merusak sejumlah fasilitas umum. Di kawasan Kleco (Karangasem), jumlah massa bertambah dengan bergabungnya puluhan lelaki muda yang bergerombol di pinggir jalan. Massa bergerak ke *showroom* mobil di *Dealer Timor*, mereka melempari batu hingga seluruh kaca *showroom* berhamburan. Bekas kantor Bank BHS Purwosari, Bank Ratu, Bank Duta serta Bank Internasional Indonesia tidak luput dari penyerbuan massa. Pelemparan batu mulai menjadi-jadi setelah massa lepas dari perempatan Gendengan (Laweyan). Sasaran pelemparan selanjutnya ialah deretan perumahan dan pertokoan di Jalan Slamet Riyadi, seperti RM Bundo, Wartel Sriwedari, gedung pertemuan Graha Wisata Niaga, toko Sami Luwes, hingga rumah Kapolwil Surakarta di timur Loji Gandrung juga terkena dampak.<sup>24</sup>

Massa seakan menyalurkan amarahnya terhadap simbol-simbol kesenjangan sosial. Massa melakukan perusakan terhadap harta benda yang menonjolkan kesenjangan sosial antara kelompok bawah dengan kelompok atas, maupun terhadap pelaku politik dan ekonomi. Sembari bergerak, massa terus melempari hampir semua pertokoan, perbankan, hingga gedung perkantoran di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Insiden pembakaran pertama kali meletus saat pergerakan massa sampai di kantor Bank BCA, Gladak. Mobil diparkir halaman kantor Bank BCA juga turut dibakar massa. Setelah itu

---

<sup>24</sup> Sholahuddin, *Op. Cit.*, hlm. 45-46.

giliran mobil di halaman Bank Danamon dan Bank Indonesia yang terkena aksi pembakaran oleh massa.<sup>25</sup>

Sekitar pukul 15.00 WIB, massa telah berkumpul di depan balai kota untuk masuk ke Jalan Urip Sumoharjo. Mereka menyasar Bank Bumi Artha, Bank Buana, bekas Bank Bali. Bersamaan dengan pergerakan massa di sekitar kawasan Surakarta lainnya. Seperti di Gading, Jebres, Nusukan, Tipes, serta hampir seluruh penjuru kota Surakarta juga mengalami aksi serupa. Kerusakan kian meluas, sebagian besar massa turun ke jalan melakukan pelemparan dan pembakaran bangunan maupun mobil dan motor dan melakukan penjarahan.<sup>26</sup>

Sekitar pukul 17.00 WIB, di Surakarta bagian utara aksi massa ialah membakar Terminal Bus Tirtonadi, setidaknya empat bus ikut terbakar oleh aksi massa saat itu. di Surakarta bagian barat, amuk massa juga menerjang kantor samsat, Jajar. Puluhan rumah di sepanjang Jalan Adisucipto dirusak. gudang coca-cola juga turut dijarah massa. Di Surakarta bagian selatan, persisnya di wilayah pertokoan Coyudan, Bank Putera dibakar habis, Plasa Singosaren berlantai tiga, Monza Dept Store, Toko Sepatu Bata dan beberapa toko lainnya turut dihanguskan massa. Adanya kerusuhan yang terjadi menyebabkan aktivitas lalu lintas menjadi berhenti. Pengguna jasa angkutan dalam kota, bus-bus kota tidak ada yang jalan, sejak pukul 13.00 WIB, roda transportasi di Surakarta lumpuh. Hingga pukul 21.00 WIB, Surakarta masih

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>26</sup> Sholahuddin, *Loc. Cit.*.

terlihat gelap. Lantaran aliran listrik di sebagian besar wilayah mati menyusul kebakaran di sejumlah tempat.<sup>27</sup>

Pada tanggal 15 Mei 1998, aksi massa dalam melakukan perusakan dan penjarahan belum berakhir. Berturut-turut sejumlah tempat yang sebelumnya luput dari amukan massa, pada akhirnya menjadi sasaran juga. Toserba Ratu Luwes, Luwes Gading, pabrik plastik serta puluhan tempat lain dibakar dan dijarah massa. Begitu juga pembakaran terhadap kendaraan roda dua dan empat masih terjadi di beberapa jalan Kota Surakarta. Roda pemerintahan dan ekonomi pada saat itu bisa dikatakan lumpuh total. Banyak toko-toko yang memilih untuk tutup. Sehingga pasar tradisional menjadi salah satu jalan untuk melayani kegiatan perekonomian warga Kota Surakarta. Aksi perusakan dan pembakaran di hari kedua terus berjalan hingga pukul 18.30 WIB. Untuk mengantisipasi aksi kerusuhan yang meluas, aparat keamanan kembali memberlakukan jam malam dengan membuat barikade di mulut jalan, maupun gang-gang kampung tempat mereka tinggal. Di hari pertama meletusnya kerusuhan sudah diberlakukannya jam malam, tetapi pemberlakuan jam malam belum efektif. Hanya di daerah-daerah tertentu jam malam berlangsung dengan baik.<sup>28</sup>

Kelompok perusuh pada kerusuhan Mei 1998 ibarat pemandu. Mereka memberikan arahan kepada massa aktif untuk merusak toko-toko yang dipilih. Kelompok perusuh memberikan gambaran awal dengan merusak dan menjebol

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>28</sup> Lydiana Salim, *Op. Cit.*, hlm. 66.

toko-toko kepada massa aktif. Dengan sendirinya massa aktif mulai mengikuti perilaku kelompok perusuh. Ditambah dengan adanya provokator yang memanfaatkan masyarakat Etnis Tionghoa sebagai kambing hitam lantaran dianggap menguasai perdagangan sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan barang. Dengan mudah membuat massa mudah tersulut.<sup>29</sup>

Minoritas Tionghoa di Surakarta menjadi sasaran amuk massa. Setiap rumah dan toko milik etnis Tionghoa di Surakarta di cat dengan tulisan besar “pribumi asli” hal ini bertujuan untuk mencegah perusakan. Tetapi, banyak diantaranya tetap dirusak dan dijarah. Ratusan orang dilaporkan hilang dan meninggal menjadi korban kebakaran dan pemerkosaan. Sasaran pemerkosaan massal serta kekerasan seksual tertuju pada perempuan etnis Tionghoa. Pada saat kerusuhan berlangsung jaminan keamanan dan hukum mulai melemah. tidak ada pencegahan, aparat hanya melihat dan tidak kuasa berbuat. Seolah dibiarkan begitu saja.<sup>30</sup>

Situasi dan kondisi yang mencekam saat itu menjadikan kota Surakarta sebagai daerah terparah kedua setelah Jakarta, atas aksi kerusuhan yang terjadi bagi masyarakat yang menjadi korban, dampak dari kerusuhan yang terjadi

---

<sup>29</sup>Massa aktif bisa diartikan sebagai massa yang memiliki tujuan ditempat tertentu, disertai dengan suasana emosional yang tinggi dan siap untuk melakukan tindakan agresif. Adapula massa pasif, di mana massa pasif adalah massa yang tidak disertai suasana emosional yang menonjol serta tidak ada kesiapan untuk melakukan suatu tindakan agresif. Biasanya massa pasif hanya sebagai penonton saja. Pokja Lemdiklat Polri T.A 2018. 2018. *Psikologi Massa dan Negosiasi Pendidikan Pembentukan Bintara Polri*. Jakarta: Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Hlm. 10.

<sup>30</sup> Ari Susanto (ed), “Merayakan Imlek di Solo: Mengubur Luka Mei 1998”, <https://www.rappler.com/world/merayakan-imlek-solo-mengubur-luka-mei-1998>. (diakses pada 16 Juli 2021, Pukul 14.33)

menyebabkan sebagian masyarakat yang menjadi korban harus kehilangan beberapa barang berharga bahkan hingga anggota keluarganya.

### C. Akhir Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta

Pada tanggal 16 Mei 1998, aksi pembakaran dan penjarahan telah mereda. Aparat telah mengamankan sedikitnya 100 perusuh dan penjarah yang tertangkap basah diamankan. Aparat keamanan juga mengeluarkan tindak tegas untuk menembak pelaku yang melakukan kerusuhan di tempat. Selain itu, sejak pada tanggal 14 Mei 1998, aparat juga menghimbau kepada masyarakat Surakarta untuk tidak keluar rumah selepas pukul 22.00 WIB.<sup>31</sup>

Polresta Surakarta bersama dengan mahasiswa Universitas Islam Batik, melakukan aksi bersih-bersih di jalan yang dipenuhi dengan sampah, puing bangunan dan bangkai kendaraan bermotor. Aksi pembersihan jalan juga dilakukan oleh pemerintah kota (pemkot). Sejak tanggal 16 Mei-17 Mei 1998, berhasil mengangkat 121 kendaraan. Pada tanggal 16 Mei 1998, berhasil mengangkat 75 kendaraan, 17 di antaranya mobil pick up, 48 mobil station dan 10 mobil sedan. Di hari berikutnya sebanyak 46 kendaraan diangkut dengan menggunakan peralatan berat dan dengan 20 truk pengangkut bangkai kendaraan. Semua rongsokan kendaraan itu dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) Puteri Cempo, Mojosongo.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sholahuddin, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>32</sup> *Ibid.*.

Tabel 3.2 Dampak Kerusakan 14-15 Mei 1998 di Surakarta.

<b>DAMPAK KERUSUHAN 14-15 MEI 1998 DI SURAKARTA</b>		
Deskripsi	Jumlah	Kerusakan/Kebakaran
Perkantoran dan Bank	6	Dibakar dan dirusak
Pertokoan dan Swalayan	27	Dibakar dan dirusak
Toko	217	Dibakar dan dirusak
Rumah makan	12	Dibakar dan dirusak
Showroom kendaraan bermotor	24	Dibakar dan dirusak
Sarana pendidikan	1	Dibakar dan dirusak
Sepeda motor	570	Dibakar dan dirusak
Bus	10	Dibakar dan dirusak
Bioskop	2	Dibakar dan dirusak
Hotel	1	Dibakar dan dirusak
Mobil dan truk	287	Dibakar dan dirusak

Sumber: Sholahuddin, *Op. Cit.*, hlm. 52.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana prasarana umum mengalami kerusakan terutama pertokoan. Selain itu 33 (tiga puluh tiga) orang menjadi korban tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Surakarta. 14 (empat belas) orang di antaranya ditemukan terpanggang di dalam bangunan Toserba Ratu luwes Pasar Legi. Sedangkan 19 (sembilan belas) orang lainnya terpanggang di Toko Sepatu Bata kawasan pertokoan, Coyudan. Korban yang

tewas dimakamkan secara massal di Astana Purwoloyo, Sekarpance. Di sisi lain, akibat banyaknya toko, swalayan, dan tempat usaha lain dirusak massa yang mengakibatkan sekitar 50.000 hingga 70.000 tenaga kerja Surakarta menganggur.<sup>33</sup>

Pada tanggal 18 Mei 1998 di pusat pemerintahan Jakarta, tuntutan kepada Soeharto pasca kerusuhan tetap berlanjut. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta berhasil menduduki gedung DPR RI guna untuk menyampaikan tuntutan mereka melengserkan Soeharto serta menginginkan adanya reformasi. Di dalam gedung DPR, pimpinan DPR dan fraksi-fraksi mengadakan rapat dengan mahasiswa yang diwakili oleh Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se Jabotabek (FKSMJ) untuk membahas mengenai situasi bangsa Indonesia saat itu.<sup>34</sup>

Reformasi benar-benar diharapkan oleh seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Mengingat keadaan yang sudah tidak terkendali, bagi Pemerintah yang sebelumnya pro serta loyal terhadap Soeharto lambat laun menyerukan aksi kepada Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 19 Mei 1998, DPR menyelenggarakan rapat dengan pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas soal permintaan pimpinan DPR Harmoko kepada presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Dengan secara terhormat dan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

<sup>34</sup>Soemardjan, S. 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka sinar harapan. Hlm. 175.

dilaksanakan secara konstitusional. Soeharto menolak mundur dari jabatannya.<sup>35</sup>

Pada akhirnya Harmoko memberikan ultimatum kepada Soeharto, diberikan pilihan untuk mundur dari jabatan pada tanggal 22 Mei 1998 atau menghadapi sidang istimewa pada tanggal 25 Mei 1998.<sup>36</sup> Menjelang akhir pemerintahan Soeharto, di Surakarta sekitar 20.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demo besar-besaran, mereka menuntut reformasi total. Meski sempat menuai kecaman karena kerusuhan pada tanggal 14-15 Mei 1998, mahasiswa Surakarta tidak takut dengan pandangan masyarakat sekitar. Pada tanggal 20 Mei 1998, mahasiswa menggelar *long march* ke balai kota Surakarta. Mereka memaksa pimpinan RRI Regional II Surakarta untuk menyiarkan Pembentukan Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta (DRMS) serta materi pernyataan sikap yang isinya: *pertama*, bahwa kerusuhan di Surakarta pada tanggal 14-15 Mei 1998, tidak dilakukan oleh mahasiswa Surakarta. *Kedua*, mengecam tindakan-tindakan perusakan dan penjarahan yang terbukti sangat merugikan serta membuat masyarakat resah. *Ketiga*, tindakan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan tujuan reformasi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Soeharto berjanji akan turun dari jabatannya, namun tidak merinci kapan kepastiannya, Soeharto hanya menyatakan akan melakukan reformasi politik dengan membentuk komite reformasi, me-*reshuffle* kabinet dan melakukan pemilu secepatnya. Bagi Soeharto keputusan untuk mundur dari jabatan kepresidenan pada saat negara sedang dilanda huru hara dan kekacauan ekonomi merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sholahuddin, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>36</sup> Luhulima. 2006. *Hari-Hari terpanjang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*. Jakarta: Penerbit buku Kompas. Hlm. 153.

<sup>37</sup> Sholahuddin, *Op. Cit.*, hlm. 76.

Fakta ini diperkuat dengan laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang menemukan adanya petunjuk mengenai keterlibatan para preman termasuk organisasi pemuda setempat, juga dari kelompok yang berbaju loreng dan baret merah sebagaimana yang digunakan oleh satuan kopassus.<sup>38</sup> Serta anggapan sebagian masyarakat Surakarta yang menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi, sudah direncanakan oleh beberapa kalangan tertentu. Hal ini terlihat jelas dari bagaimana cara mereka memprovokasi massa agar melakukan pembakaran dan perusakan toko-toko.

Pada tanggal 21 Mei 1998, secara resmi Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden yang kedua. Sekaligus mengakhiri rezim orde baru yang telah berkuasa selama tiga dasawarsa. Kabar ini menjadi tonggak kemenangan mahasiswa dalam aksi menuntut adanya reformasi. mahasiswa Surakarta yang melakukan *long march* hingga menduduki balaikota Surakarta sejak tanggal 20 Mei 1998, menyerukan kebahagiaannya di lapangan terbuka depan gedung balaikota Surakarta. Hal ini mengakhiri rentetan peristiwa kerusuhan yang cikal bakal bermula dari tuntutan reformasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Surakarta.<sup>39</sup>

TGPF yang terdiri atas orang-orang pemerintahan, militer, analisis, dan aktivis Lembaga Masyarakat Swadaya (LSM). Mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap perempuan etnis

---

<sup>38</sup>Sadli Saporinah, dkk. 2002. *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 (Lampiran Laporan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan)*. Jakarta: Komnas Perempuan dan New Zealand Official Development Assistance. Hlm. 22.

<sup>39</sup> Sholahuddin, *Loc. Cit.*,

Tionghoa benar terjadi adanya. Selain itu terdeteksi adanya pembunuhan dan penganiayaan oleh sekelompok orang yang terlatih dan digerakkan secara serentak oleh suatu kelompok terselubung. TGPF menemukan fakta bahwa pada saat terjadi kerusuhan Mei 1998, koordinasi antara satuan keamanan kurang memadai, adanya keterlambatan antisipasi. Di beberapa tempat didapatkan bukti bahwa jasa-jasa keamanan dikomersilkan. Begitu juga TGPF menemukan adanya kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan aparat keamanan.<sup>40</sup>

Pasca kerusuhan Mei 1998, pelanggaran HAM serta unsur SARA terjadi di beberapa daerah Indonesia. Hal ini didasarkan pada perubahan rezim yang memerlukan proses adaptasi. Terutama pada keadaan dan kondisi masyarakat etnis Tionghoa yang semakin lama semakin mendapatkan perhatian. Arus reformasi yang dirasakan masyarakat Etnis Tionghoa sedikit lebih baik daripada yang mereka rasakan saat masa orde baru. Setidaknya masyarakat Etnis Tionghoa saat ini bisa bersanding dan hidup rukun dengan masyarakat Etnis non Tionghoa.

---

<sup>40</sup>Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta. BAB IV Temuan tentang Pola Umum Kerusuhan. *Semanggeduli.com* diakses melalui <https://semanggeduli.com/laporan-tgpf/bab/bab-iv-temuan/>. (diakses pada 15 Juli 2021, Pukul 20.30).